

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan Pertanian

Paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan dapat menjadi solusi alternatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan akan makin optimal jika disinergikan dengan komitmen untuk membangun kemitraan di antara pelaku agribisnis. Pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan usaha dapat menjamin terciptanya efisiensi dan pertumbuhan, keadilan dan pemerataan, serta berwawasan lingkungan. Untuk mendukung upaya ini diperlukan konsolidasi kelembagaan yang mantap, baik di tingkat petani, pihak swasta maupun pemerintah (Septana dan Ashari, 2007).

Menurut Priyono (2010), dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep maksimalisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan asset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Indikator utama dimensi ekonomi ini ialah tingkat efisiensi, dan daya saing, besaran dan pertumbuhan nilai tambah (termasuk laba), dan stabilitas ekonomi. Dimensi ekonomi menekankan aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi (material) manusia baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan, berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis (termasuk tercegahnya konflik sosial), preservasi keragaman budaya dan modal sosio-kebudayaan, termasuk perlindungan terhadap suku minoritas. Untuk itu, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipasi sosial politik dan stabilitas sosial-budaya merupakan indikator-indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pengembangan agribisnis dalam perspektif pembangunan pertanian yang berkelanjutan, perlu memperhatikan beberapa aspek penting berikut (Asriani, 2003) :

Pertama, aspek sumberdaya (*resource endowment*). Memperhatikan aspek *resource endowment* adalah penting termasuk di dalamnya menjaga kelestariannya, yang meliputi :

1. Meningkatkan produktivitas pertanian (*productivity*) dengan rekayasa teknis atau sosial ekonomi.
2. Meningkatkan kestabilan produktivitas (*stability*)
3. Mempertahankan aspek kesinambungan (*sustainability*) dari perusahaan pertanian
4. Mempertahankan dan meningkatkan pemerataan (*equitability*).

Kedua, aspek teknologi (*technological endowment*). Produksi pertanian tidak dapat meningkat bila pelaksanaannya tidak menguasai teknologi. Oleh karena itu proses adopsi inovasi terhadap teknologi baru sangat penting, dan dalam hal ini peranan penyuluh pertanian menjadi sangat strategis.

Ketiga, aspek kelembagaan (*institutional endowment*). Di dalam mengembangkan konsep agribisnis, sebaiknya produsen atau juga petani mampu untuk mengusahakan sendiri produksi pertaniannya, mengolah hasilnya dan sekaligus memasarkannya pada kondisi harga yang menguntungkan. Keempat, aspek yang berkaitan dengan kebudayaan (*cultural endowment*). Aspek ini sering dilupakan orang dan oleh karenanya banyak analis yang mengasumsikan masalah *culture* adalah konstan. Padahal justru aspek ini berkembang secara dinamis.

Menurut Notohaprawiro (2006) pertanian rakyat hendaknya dijadikan sasaran inti karena sektor ini akan dapat menjadi piranti perangkai globalisasi dengan demokratisasi ekonomi. Pertanian rakyat yang kuat juga mampu menangkis krisis ekonomi. Untuk menyusun strategi baru yang andal menuju ke intensifikasi berkelanjutan diperlukan pengenalan lengkap faktor-faktor yang menentukan atau mempengaruhi kinerja pertanian rakyat dengan menggunakan usahatani selaku satuan pantau. Faktor-faktor tersebut mencakup komponen-komponen lingkungan biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan politik.

2.2. Kesiapan Modal Dalam Peremajaan

Menurut Tarmisol (2012) banyaknya tanaman kelapa sawit yang berusia tua, produktivitasnya menurun. perlu diremajakan. Peremajaan memerlukan kajian mengenai biaya investasi dan terhentinya produksi. Penentuan waktu peremajaan merupakan titik krusial, berkaitan dengan efisiensi produksi pada rentang umur ekonomis.

Penelitian Siregar dan Nauman (2011) pada perkebunan karet menunjukkan peremajaan dan rehabilitasi tanaman karet diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan (*sustainable replanting*) dengan menggunakan klon unggul penghasil lateks dan pemanfaatan kayu. Percepatan peremajaan dan rehabilitasi karet tua dan tidak produktif pada perkebunan karet rakyat ditujukan dalam upaya peningkatan adopsi klon unggul, yang diharapkan dapat dilakukan melalui program peremajaan berbantuan (pemerintah), swadaya masyarakat ataupun melalui model Percepatan Peremajaan Karet Partisipatif (model ini digunakan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan). Diversifikasi tanaman karet dapat dilakukan untuk tujuan optimalisasi lahan. Pada umumnya tanaman karet yang belum menghasilkan (berumur dibawah 3 tahun) di diversifikasi dengan tanaman pangan seperti padi gogo atau palawija.

Susila (2004). Sektor atau komoditas unggulan sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan itu, tulisan ini mencoba menilai kontribusi industri berbasis kelapa sawit dalam pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan distribusi pendapatan. Hasil studi menunjukkan bahwa industri kelapa sawit mempunyai peran yang penting dalam ketiga aspek tersebut. Pengembangan kelapa sawit berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan investasi, output, dan devisa. Industri berbasis kelapa sawit mempunyai kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam hal pendapatan dan aset. Sekitar Rp5–Rp11 juta atau lebih dari 63% pendapatan rumah tangga berasal dari usaha kelapa sawit. Kontribusi usaha kelapa sawit terhadap aset juga sangat nyata,

sekitar 63–72%. Peran dalam mengentaskan kemiskinan tercermin dari jumlah penduduk miskin yang kurang dari 10% pada masyarakat yang mengusahakan kelapa sawit. Distribusi pendapatan di sentra produksi kelapa sawit cukup baik (*fairly egalitarian*) dengan koefisien gini sekitar 0,36. Untuk mengatasi beberapa faktor penghambat dalam mempertahankan dan meningkatkan peran industri kelapa sawit dalam pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan distribusi pendapatan, beberapa isu kebijakan didiskusikan.

Herman M dan Pranowo D (2011). Pemanfaatan lahan diantara tanaman sawit TBM dengan tanaman sela jagung merupakan salah satu alternatif untuk mensubstitusi pendapatan petani yang hilang dari tanaman sawitnya yang diremajakan dan memiliki potensi yang besar untuk mendukung swasembada Jagung nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola peremajaan sawit rakyat secara tebang bertahap 20% menyebabkan tanaman sawit muda mengalami etiolasi sehingga pertumbuhannya kurang baik dibanding pola peremajaan secara tebang bertahap 40 dan 60%. Pola peremajaan sawit rakyat secara tebang bertahap 20, 40, maupun 60% tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman sela jagung. Hasil pipilan kering jagung yang diperoleh 0,9-2,6 t/ha dengan tambahan pendapatan dari tanaman sela jagung Rp. 1,9–5,2 juta rupiah per musim tanam.

Penguasaan asset yang paling signifikan mencerminkan tingkat ekonomi petani adalah luas kepemilikan dan penguasaan lahan. Namun di daerah transmigrasi variasi penguasaan lahan tidak begitu besar seperti halnya masyarakat non transmigran. Sebab pada awalnya semua petani mendapat jatah lahan dengan luas yang sama yaitu rata-rata 2 Ha lahan garapan dan 0,25 Ha pekarangan per kepala keluarga. Perubahan akan terjadi setelah beberapa tahun, dimana ada petani yang menjual dan membeli tanah dan ada rumah tangga baru (Pecahan KK) yang menyebabkan sebagian petani harus membagi lahannya kepada keluarga yang baru. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak akan membuat ketimpangan kepemilikan lahan yang besar, seperti halnya pada masyarakat petani non transmigrasi (Swastika, dkk. 2000).

Berubahnya orientasi usahatani dapat dimaklumi karena tujuan untuk meningkatkan pendapatan merupakan konsekuensi dari semakin meningkatnya kebutuhan usahatani dan kebutuhan hidup petani bersama keluarganya. Harga-harga kebutuhan sehari-hari peningkatannya lebih cepat dibandingkan dengan harga-harga hasil pertanian. Di samping itu, nilai tukar komoditas pertanian semakin memburuk dibandingkan dengan komoditas industri dan jasa. Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila petani cenderung memilih jenis tanaman yang laku di pasar sehingga dapat memberikan penghasilan dan keuntungan yang lebih tinggi (Antara, 2004).

2.3. Kesiapan Pengeluaran Menghadapi Masa Tunggu

Pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Usaha perkebunan kelapa sawit memiliki siklus usaha, mulai dari tahap penanaman, produksi dan memasuki usia tua. Dengan demikian petani kelapa sawit harus sadar bahwa usaha mereka ada masa akan menghadapi siklus tersebut. Oleh karena itu, mereka seyogyanya telah mempersiapkan untuk menghadapi masa dimana usaha mereka tidak produktif lagi dan harus melakukan peremajaan kebun.

Namun demikian hasil penelitian Taryono (2010) menunjukkan bahwa pada tahap awal tanaman kelapa sawit mulai produksi pengeluaran rumah tangga sebagian besar (68,02 persen) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan selebihnya 31,98 persen untuk kebutuhan non pangan. Pengeluaran non pangan pada umumnya diperuntukkan untuk memperbaiki rumah (11,98 persen), membiayai pendidikan sebesar (3,85 persen), transportasi (6,39 persen), dan pakaian (3,13 persen). Meningkatnya pendapatan juga mendorong gaya hidup petani kelapa sawit cenderung konsumtif. Pola hidup petani yang cenderung konsumtif pada tahap awal dikhawatirkan mereka kurang menyiapkan tabungan untuk menghadapi masa peremajaan kebun.

Padahal berdasarkan hasil penelitian Iyan (1991) pada perkebunan kelapa menunjukkan bahwa pendapatan bersih petani kelapa yang telah melakukan peremajaan lebih besar dibandingkan dengan petani kelapa yang belum melakukan peremajaan. Rata-rata pendapatan petani kelapa peremajaan dari usaha tani kelapa sebesar Rp.1.559.443,00 , sedangkan rata-rata pendapatan petani kelapa non peremajaan Rp.829.767,00.

Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada kesiapan petani kelapa sawit rakyat untuk melakukan peremajaan (*replanting*). Kemudian penelitian lanjutan tahap berikutnya adalah untuk menyusun pola pengembangan peremajaan (*replanting*) perkebunan kelapa sawit rakyat melalui kemitraan lembaga keuangan dan kebijakan pemerintah.